

Pelaksanaan E-Budgeting Bukti Keterbukaan Pemprov Kalteng

BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah melaksanakan e-Budgeting untuk keterbukaan penganggaran.

Gubernur Kalteng Sugianto menyebut ini sebagai bukti tidak ada hal yang ditutupi Pemprov. “Pemprov sudah melaksanakan e-budgeting, kita tidak pernah tutupi informasi termasuk berkaitan anggaran,” katanya.

Sugianto menjelaskan pelaksanaan e-budgeting yang memudahkan kontrol terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam APBD ini, dalam kerangka kesiapan e-government.

Dengan keterbukaan pengelolaan pemerintahan, akan menuju prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan good governance.

“Kita termotivasi untuk terus melakukan perbaikan, pembenahan, supaya Kalteng-nya sejahtera. Hal ini harus diikuti dengan niat baik seluruh jajaran baik kepala dinas atau badan lingkup Pemprov, supaya terwujud visi misi Kalteng Berkah,” tutupnya. (ROZIQIN/B-6)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/98269-pelaksanaan-e-budgeting-bukti-keterbukaan-pemprov-kalteng>

<https://uangteman.com/blog/indonesia/transparansi-anggaran-melalui-e-budgeting/>

<http://irmajhe.blogspot.com/2017/07/makalah-e-budgeting.html>

Catatan:

E-budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat.

Tujuan diterapkannya e-budgeting antara lain:

1. Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran
2. Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran
3. Meningkatkan proteksi anggaran serta pengawasan atas anggaran tersebut baik penggunaan maupun pada saat penyusunan
4. Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran

Manfaat e-budgeting adalah:

1. Kontrol akan lebih mudah dilakukan
2. Kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan
3. Transparansi anggaran dapat ditingkatkan
4. Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan.

Sistem e-budgeting kini pun mulai membuktikan sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional. Beberapa keunggulannya seperti:

1. *Mencegah tindakan korupsi*

Praktik korupsi di sejumlah daerah terkadang bisa disamakan dengan proses manipulasi data keuangan. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah semisal ada penggelapan atau penggelembungan dana yang tiba-tiba terjadi dalam sebuah data keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem e-budgeting, upaya-upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah diinput sudah tak bisa diutak-atik lagi dan telah tersebar ke publik.

2. *Prinsip Transparansi Publik*

Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan praktik dari demokratisasi keuangan di sebuah pemerintah daerah. Warga bisa langsung melayangkan keluhan jika mencurigai data yang tidak semestinya. Mereka juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi publik merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan APBD.

Prinsip keterbukaan data informasi keuangan kepada masyarakat juga sudah diatur dalam aturan perundangan yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006. Peraturan inilah yang menjadi pedoman penerapan sistem e-budgeting untuk setiap instansi pemerintahan daerah di Indonesia.

3. *Efisiensi Pendataan Keuangan*

Sistem pendataan keuangan pun bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan sistem dan jaringan terpadu, maka pemerintah daerah bisa langsung mengendalikan dan mengevaluasi secara langsung. Di saat bersamaan, warga juga bisa berperan aktif dalam mengawal data yang telah tersimpan secara online tersebut.

Meski sering dipuji sebagai sebuah terobosan kebijakan keuangan yang berpihak pada masyarakat, tetap saja ada sebuah kelemahan yang sangat mengkhawatirkan. Kelemahan itu terkait pada rentannya sistem pemerintah yang cenderung mudah dibobol oleh hacker atau terkena pengaruh virus online yang bisa merusak data. Tapi kemungkinan-kemungkinan tersebut pastinya sudah diantisipasi melalui sistem keamanan yang diterapkan dalam e-budgeting. Sejauh ini, lebih banyak keunggulan yang menonjol dari sistem e-budgeting, namun harus tetap mengedepankan optimalisasi dari segi teknis dan kemampuan pengelolaan yang tepat dari SDM yang bertanggungjawab.